

EFEKTIVITAS PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA MELALUI PEMBEBASAN BERSYARAT (PB) DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II AMUNTAI

Tanisa Aziza Fitria¹, Djayeng Turano Gunade², Anna Mariyati³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: tized.aziza@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program reintegrasi sosial narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai. Program ini berfungsi sebagai upaya untuk membantu narapidana beradaptasi kembali ke masyarakat guna mengurangi risiko residivisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder didapat dari dokumentasi dan literatur terkait. Analisis efektivitas program didasarkan pada teori efektivitas Campbell dalam Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin yang mencakup empat sub variabel, yaitu: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program reintegrasi sosial di Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai telah berjalan sesuai prosedur dan mencapai target yang ditetapkan. dan beberapa subvariabel juga cukup efektif. akan tetapi masih ada kendala berupa pelanggaran hukum baru, stigma negatif yang menghambat mereka juga untuk mendapat pekerjaan yang layak, serta kualitas program reintegrasi di balai pemasyarakatan yang belum cukup optimal. Faktor pendorong dalam efektivitas program reintegrasi sosial melalui pembebasan bersyarat (PB) ini adalah dukungan dari keluarga, masyarakat, dan sumber daya manusia yang terlibat. faktor penghambat: masih adanya residivisme yang menunjukkan narapidana kembali melakukan tindak kejahatan ulang setelah bebas, stigma sosial dan diskriminatif terhadap mantan narapidana yang masih kuat yang mana hal tersebut menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta kualitas pelaksanaan program reintegrasi sosial di balai pemasyarakatan belum optimal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan program reintegrasi sosial yang lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan peran Balai Pemasyarakatan dalam meminimalisir tingkat residivisme di masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas, Reintegrasi Sosial, Narapidana, Balai Pemasyarakatan, Residivisme.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the inmate social reintegration program at Balai Pemasyarakatan Class II Amuntai. This program serves as an effort to help inmates readjust to society to reduce the risk of recidivism. The research employs a qualitative approach with a descriptive method. Primary data were collected through interviews and direct observations, while secondary data were obtained from documentation and relevant literature. The analysis of program effectiveness is based on Campbell's effectiveness theory in Dyah Mutiarin and Arif Zaenudin, which includes four sub-variables: 1. Program success 2. Target achievement 3. Program satisfaction 4. Input and output levels. The research findings indicate that the social reintegration program at Balai Pemasyarakatan Class II Amuntai has been implemented according to procedures and has achieved its set targets. Several sub-variables have also been relatively effective. However, there are still obstacles, such as new legal violations, negative stigma that hinders former inmates from obtaining decent jobs, and the quality of the reintegration program that has not yet been fully optimized. The supporting factors for the effectiveness of this social reintegration program include adequate funding, sufficient facilities, the readiness and interest of inmates, as well as support from family, the community, and the involved human resources. The inhibiting factors include the persistence of recidivism, indicating that some inmates commit repeat offenses after release; strong social stigma and discrimination against former inmates, which hinder their access to proper employment; and the suboptimal quality of the social reintegration program's implementation at the correctional facility. This research is expected to serve as input for developing a more effective social reintegration program, thereby enhancing the role of Balai Pemasyarakatan in minimizing the rate of recidivism in society.

Keywords: Effectiveness, Social Reintegration, Inmates, Correctional Facility, Recidivism.

PENDAHULUAN

Program reintegrasi sosial bagi narapidana merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, dengan tujuan utama membantu narapidana beradaptasi kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Program ini diharapkan dapat mencegah narapidana kembali melakukan tindak pidana atau yang sering disebut sebagai residivisme, serta mendukung mereka untuk menjalani kehidupan yang produktif.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Amuntai adalah salah satu lembaga yang berperan dalam menjalankan program reintegrasi sosial, khususnya bagi narapidana yang dibebaskan bersyarat, di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Balai Pemasyarakatan berfungsi sebagai penghubung antara lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, serta memberikan dukungan agar narapidana yang dibebaskan bersyarat dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan sosial mereka. Program ini diharapkan dapat membantu narapidana untuk menghindari kembali terjerumus dalam tindak pidana.

Namun, efektivitas program reintegrasi sosial melalui pembebasan bersyarat sering kali dipertanyakan. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti partisipasi aktif masyarakat, dukungan keluarga, serta kesiapan narapidana itu sendiri dalam menjalani proses reintegrasi. Selain itu, faktor-faktor internal, seperti kualitas pelaksanaan program oleh Bapas dan adanya stigma sosial terhadap mantan narapidana, juga dapat mempengaruhi efektivitas program ini.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, penulis menemukan beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial melalui pembebasan bersyarat di Bapas Kelas II Amuntai, antara lain:

1. Stigma sosial dan diskriminatif terhadap mantan narapidana yang masih kuat. narapidana yang telah menjalani hukuman sering kali masih dihadapkan pada stigma yang kuat dari masyarakat, yang menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan.
2. Kualitas Pelaksanaan program reintegrasi sosial di balai pemasyarakatan belum optimal. Beberapa program yang seharusnya berkelanjutan tidak dijalankan secara konsisten dan evaluasi terhadap hasil program sering kali kurang memadai.
3. Masih adanya residivisme yang menunjukkan narapidana kembali melakukan tindak kejahatan setelah bebas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program reintegrasi sosial narapidana melalui pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas II Amuntai, guna mengetahui sejauh mana program ini berhasil mencapai tujuannya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi program tersebut. Dengan memahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan program, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan program di masa depan dan turut berkontribusi dalam upaya mengurangi angka residivisme di wilayah Amuntai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah istilah yang merujuk pada sesuatu yang mempunyai manfaat, efek, atau kemampuan untuk menghasilkan hasil. Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, dan keselarasan dalam suatu kegiatan orang yang melakukan tugas dengan sasaran yang dituju.

Efektivitas adalah keberhasilan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya, yaitu hubungan output-tujuan. Efektivitas diukur berdasarkan seberapa cepat produksi, anggaran, dan prosedur suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Simamora (2009), efektivitas diukur dengan sejauh mana suatu tujuan atau sasaran tercapai. Efektivitas merupakan suatu konsep luas yang mencakup berbagai faktor baik yang ada di dalam maupun di luar diri seseorang. Oleh karena itu, efektivitas tidak hanya dilihat dari segi produktivitas, namun juga dari segi persepsi atau kapasitas individu.

Lebih lanjut Makmur (2011) menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian, kompetensi, dan keberhasilan suatu organisasi. Selanjutnya, untuk menentukan tingkat

efisiensi operasional suatu organisasi, kelompok, atau negara, kita harus melakukan perbandingan dengan status quo atau dengan keadaan. Dengan meningkatnya tingkat kesulitan, maka akan meningkat pula kemampuan untuk melaksanakan setiap kegiatan atau pekerjaan yang telah didanai.

Menurut Handyaningrat (1985: 16) dalam Alimin (2016), efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Banyak pemerintah dapat hanya menerapkan kebijakan, namun kenyataannya kebijakan yang diterapkan dapat menyebabkan gangguan atau perubahan yang signifikan. Hal ini disebut sebagai kesenjangan implementasi, atau situasi di mana terdapat perbedaan antara apa yang diharapkan dari mereka yang membuat proyek dan apa yang sesungguhnya tercapai sebagai hasil pelaksanaan proyek.

Efektivitas merupakan ukuran seberapa baik suatu tujuan (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah terpenuhi. Semakin besar penyajian target, maka efektivitas akan semakin meningkat. (Hidayat, 1986). Teori lain berpendapat bahwa Efektivitas adalah penggunaan sumber daya dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu. Efektivitas mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil suatu tugas meningkat, maka efisiensinya pun akan meningkat. (Siagian, 2001). Berdasarkan informasi yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tingkat yang menunjukkan berapa kali suatu tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah terpenuhi oleh suatu organisasi.

Reintegrasi sosial adalah proses mengembalikan individu ke dalam masyarakat setelah mereka mengalami situasi yang membuat mereka terpinggirkan atau terasing. Situasi ini dapat mencakup masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, perawatan rehabilitasi narkoba, pengungsian akibat konflik atau bencana, dan sebagainya. Tujuan utama dari reintegrasi sosial adalah memastikan individu tersebut dapat kembali menjalankan peran sosialnya secara produktif dan harmonis dalam masyarakat. Proses ini juga bertujuan mengurangi risiko pengulangan perilaku bermasalah yang sebelumnya menyebabkan keterasingan mereka. Reintegrasi sosial melibatkan berbagai pendekatan, termasuk intervensi psikologis, pelatihan keterampilan, serta pendampingan sosial dan hukum.

Reintegrasi sosial biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan individu, seperti pendidikan, kesehatan mental, atau pelatihan kerja. Tahap kedua adalah pemberian dukungan berbasis kebutuhan tersebut. Misalnya, mantan narapidana dapat diberikan pelatihan kerja agar memiliki keterampilan yang dapat diterapkan di dunia kerja. Strategi lain melibatkan pendekatan psikososial, seperti konseling dan terapi kelompok, untuk membantu mereka mengatasi stigma dan membangun kembali rasa percaya diri. Pada tahap akhir, evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa individu berhasil menyesuaikan diri dengan masyarakat tanpa kembali ke perilaku bermasalah.

tujuan reintegrasi sosial mulia, proses ini seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah stigma sosial yang melekat pada individu yang kembali dari kondisi terpinggirkan. Stigma ini dapat mempersulit mereka untuk mendapatkan pekerjaan, diterima oleh masyarakat, atau bahkan mendapatkan dukungan dari keluarga. Tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya, baik dalam bentuk anggaran maupun tenaga pendukung, yang sering kali membuat program reintegrasi tidak berjalan optimal. Selain itu, ada masalah kebijakan yang tidak selalu mendukung reintegrasi. Misalnya, beberapa kebijakan memperlakukan narapidana atau mantan pengguna narkoba sebagai ancaman alih-alih individu yang perlu didukung.

Keberhasilan reintegrasi sosial sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara berbagai pihak. Keterlibatan komunitas adalah kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung individu untuk menjalani hidup baru. Pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan kesempatan kedua dapat membantu mengurangi stigma. Selain itu, kerangka kebijakan yang mendukung, seperti pembentukan program pelatihan kerja atau layanan kesehatan mental yang terjangkau, adalah elemen penting dalam memastikan keberlanjutan reintegrasi sosial. Kesuksesan reintegrasi tidak hanya memberikan manfaat bagi individu tersebut, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena dapat menurunkan tingkat kriminalitas, meningkatkan produktivitas

ekonomi, dan memperkuat kohesi sosial.

Narapidana adalah individu yang menjalani hukuman penjara atas tindakan melanggar hukum yang telah mereka perbuat, sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mereka merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera, rehabilitasi, dan pelurusan perilaku sosial yang dianggap menyimpang. Dalam konteks hukum, narapidana memiliki hak-hak tertentu meskipun kebebasan mereka dibatasi, seperti hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, berkomunikasi dengan keluarga, dan melanjutkan pendidikan. Dengan adanya pembatasan ini, penjara tidak hanya menjadi tempat hukuman, tetapi juga tempat pembinaan yang seharusnya mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan pola pikir dan perilaku yang lebih baik.

Proses pembinaan narapidana merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemasyarakatan. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah untuk membantu narapidana memahami kesalahan mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam praktiknya, program pembinaan meliputi berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, pendidikan formal, kegiatan keagamaan, dan layanan konseling psikologi. Dengan berbagai program ini, pemerintah berharap narapidana dapat menemukan potensi baru dalam dirinya sehingga mereka dapat menjadi individu yang produktif setelah keluar dari penjara. Namun, efektivitas pembinaan ini masih menjadi tantangan karena berbagai faktor, seperti keterbatasan fasilitas, kekurangan staf pembina, hingga overkapasitas di banyak lembaga pemasyarakatan.

Namun, kehidupan di balik jeruji besi sering kali membawa tantangan psikologis dan sosial bagi narapidana. Kehilangan kebebasan, perasaan terisolasi, serta stigma dari masyarakat menjadi tekanan berat yang harus mereka hadapi. Kondisi penjara yang sering kali penuh sesak dan kurang layak juga menambah beban fisik dan mental narapidana. Dalam beberapa kasus, pengalaman buruk di penjara justru dapat memperburuk perilaku seseorang, membuat mereka lebih rentan kembali pada kehidupan kriminal setelah bebas. Oleh karena itu, penanganan narapidana harus didukung dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial agar rehabilitasi mereka dapat berjalan optimal.

Selain pembinaan narapidana, masyarakat juga memegang peran penting dalam keberhasilan reintegrasi mereka. Narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi yang menghambat mereka untuk kembali menjalani kehidupan normal. Stigma tersebut dapat berbentuk sulitnya mendapatkan pekerjaan, kurangnya dukungan sosial, hingga perlakuan diskriminatif yang membuat mereka merasa terasing. Dukungan dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat secara umum sangat penting untuk memberikan narapidana kesempatan kedua. Pendekatan inklusif, kampanye anti-stigma, dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih baik bagi mantan narapidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Fungsi utama BAPAS adalah memberikan bimbingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, yaitu individu yang menjalani masa pidana di luar lembaga pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan mencakup berbagai kategori, seperti narapidana yang mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat, atau cuti menjelang bebas, serta anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui pendekatan yang humanis, BAPAS bertujuan mendukung reintegrasi sosial klien ke dalam masyarakat sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif dan bermartabat.

Dalam operasionalnya, Balai Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala BAPAS dan melibatkan berbagai tenaga ahli, seperti Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan petugas teknis lainnya. Peran utama PK adalah melaksanakan bimbingan kepada klien berdasarkan kebutuhan mereka. Proses bimbingan meliputi asesmen awal untuk memahami situasi klien, pelaksanaan rencana pembimbingan yang dirancang secara individual, hingga evaluasi keberhasilan program tersebut. Pelayanan BAPAS tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga melibatkan pendekatan psikologis, sosial, dan ekonomi untuk memastikan klien mendapatkan dukungan yang

komprehensif. Pendekatan ini menjadi kunci dalam membantu klien menjalani kehidupan bebas tanpa mengulang tindakan kriminal.

BAPAS memiliki tanggung jawab besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam mendukung proses peralihan dari masa pidana ke kehidupan sosial. Salah satu fokus utamanya adalah membimbing klien untuk memahami konsekuensi tindakan mereka dan memperbaiki diri. BAPAS juga memfasilitasi klien untuk memperoleh keterampilan kerja, pendidikan, atau pelatihan yang dibutuhkan agar mampu mandiri secara ekonomi setelah kembali ke masyarakat. Di sisi lain, BAPAS juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan dunia usaha untuk memperluas akses peluang bagi klien.

Keberadaan Balai Pemasyarakatan mencerminkan paradigma pemasyarakatan yang berfokus pada pemulihan, bukan semata-mata hukuman. Filosofi ini sejalan dengan semangat sistem pemasyarakatan Indonesia yang berprinsip pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Melalui pendekatan yang berbasis kemanusiaan dan inklusivitas, BAPAS berupaya memastikan klien dapat diterima kembali di masyarakat tanpa stigma negatif. Hal ini sekaligus menjadi upaya strategis untuk mengurangi tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana. Dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan, BAPAS memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan.

Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang tepat dan optimal. Dalam banyak aspek kehidupan, seperti pekerjaan, pendidikan, maupun manajemen, efektivitas menjadi elemen kunci yang menentukan keberhasilan. Efektivitas berbeda dari efisiensi meskipun keduanya sering digunakan secara bersamaan. Sementara efisiensi berfokus pada penggunaan sumber daya secara hemat, efektivitas berorientasi pada hasil akhir yang diinginkan. Sebagai contoh, sebuah organisasi yang efektif mampu menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan, terlepas dari jumlah sumber daya yang digunakan. Konsep efektivitas ini menjadi sangat penting karena memastikan bahwa upaya yang dikerahkan memiliki dampak nyata dan relevan.

Dalam dunia kerja, efektivitas sering kali menjadi indikator keberhasilan individu maupun tim. Karyawan yang efektif adalah mereka yang tidak hanya menyelesaikan tugas dengan benar, tetapi juga melakukannya dengan memprioritaskan hal-hal yang paling penting. Hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan utama yang ingin dicapai, keterampilan untuk memprioritaskan pekerjaan, dan kemampuan untuk fokus pada tugas yang memiliki dampak terbesar. Strategi seperti manajemen waktu, delegasi tugas, dan evaluasi berkala sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas seseorang di tempat kerja. Dalam konteks tim atau organisasi, efektivitas tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada komunikasi yang baik, kolaborasi, dan kepemimpinan yang kuat. Tanpa koordinasi yang memadai, sumber daya yang melimpah pun tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama.

Selain dalam dunia kerja, efektivitas juga berperan besar dalam kehidupan pribadi. Dalam pengelolaan waktu, misalnya, efektivitas membantu seseorang memutuskan apa yang benar-benar penting dan harus diprioritaskan di tengah berbagai tuntutan hidup. Dengan berfokus pada tujuan yang lebih besar, individu dapat menghindari distraksi yang tidak mendukung kemajuan mereka. Salah satu prinsip yang sering digunakan untuk mencapai efektivitas dalam kehidupan sehari-hari adalah prinsip Pareto atau 80/20, yang menyatakan bahwa 80 persen hasil sering kali berasal dari 20 persen upaya. Dengan memahami prinsip ini, seseorang dapat memusatkan perhatian pada aktivitas atau tugas yang memberikan nilai tambah terbesar bagi kehidupannya, seperti memperbaiki hubungan interpersonal, meningkatkan kesehatan, atau mengembangkan keterampilan baru.

Dalam perspektif organisasi, efektivitas juga sangat relevan dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Sebuah organisasi yang efektif memiliki struktur dan proses kerja yang dirancang untuk merespon kebutuhan pasar dengan cepat dan tepat. Ini melibatkan inovasi, pengelolaan sumber daya manusia yang bijaksana, serta penerapan teknologi yang relevan. Selain itu, organisasi yang efektif memiliki budaya kerja yang mendukung, di mana setiap anggota merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Efektivitas organisasi juga sering diukur melalui kinerjanya

terhadap indikator spesifik, seperti produktivitas, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, efektivitas bukan sekadar tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang melakukannya secara berkelanjutan dan konsisten dalam menghadapi tantangan yang dinamis.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip efektivitas dalam berbagai aspek kehidupan, baik individu maupun organisasi dapat mencapai hasil yang optimal. Konsep ini mengajarkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa keras seseorang bekerja, tetapi juga oleh seberapa cerdas mereka memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan mereka.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, petugas Bapas, serta masyarakat yang berinteraksi dengan mantan narapidana. Observasi langsung juga dilakukan untuk memahami kondisi lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan.

Analisis dilakukan berdasarkan empat indikator efektivitas menurut Campbell: (1) keberhasilan program, (2) keberhasilan sasaran, (3) kepuasan terhadap program, dan (4) tingkat input dan output.

PEMBAHASAN

1. Keberhasilan Program.

Mengukur sejauh mana program reintegrasi sosial bagi klien rehabilitasi di Balai Pemasyarakatan berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu rehabilitasi kembali ke masyarakat dengan cara yang positif. Keberhasilan program dapat ditunjukkan dari seberapa cepat program tersebut dapat memahami hukum dan norma sosial, serta seberapa cepat program tersebut tidak kembali ke proses hukum setelah selesai.

a. Ketercapaian target program

Ketercapaian Target Program adalah mengukur sejauh mana program reintegrasi sosial melalui pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

program ini terlaksana dengan cukup baik, meskipun ada beberapa kendala yaitu, narapidana yang tidak berhasil mengikuti program dengan baik, seperti pelanggaran hukum baru oleh narapidana menjadi indikator ketidakberhasilan program reintegrasi sosial ini. Namun, persentase residivisme relatif rendah.

b. Terlaksananya Program

Kegiatan program reintegrasi sosial tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan program mencakup berbagai tahapan, mulai dari persiapan, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi. Terlaksananya program berfokus pada apakah semua komponen yang direncanakan sudah dilaksanakan dengan baik.

program ini terlaksana dengan cukup baik, meskipun ada beberapa kendala yaitu, narapidana yang tidak berhasil mengikuti program dengan baik, seperti pelanggaran hukum baru oleh narapidana menjadi indikator ketidakberhasilan program reintegrasi sosial ini. Namun, persentase residivisme relatif rendah.

2. Keberhasilan Sasaran

Sasaran dalam program reintegrasi sosial mencakup klien narapidana yang memenuhi kriteria tertentu untuk mendapatkan layanan reintegrasi. Keberhasilan sasaran di sini mengacu pada akurasi dalam menargetkan narapidana yang benar-benar membutuhkan dan layak mendapatkan layanan program reintegrasi. Misalnya, narapidana yang berpotensi berubah dan menunjukkan motivasi untuk memperbaiki diri selama proses pemasyarakatan. Indikator ini

mengevaluasi apakah sasaran program sudah tepat, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal.

a. Terpenuhinya target narapidana

Jumlah narapidana yang ditargetkan untuk mengikuti program reintegrasi sosial dapat tercapai. Ini mencakup penilaian apakah target peserta program dapat dipenuhi, baik dalam hal jumlah narapidana yang mendaftar maupun yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang disediakan.

secara keseluruhan, target peserta program telah tercapai, meskipun ada beberapa tantangan. target yang telah tercapai sekitar 50% hingga 70%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana yang disasar oleh program telah ikut berpartisipasi, meskipun ada beberapa yang tidak berhasil mengikuti program dengan baik, seperti kasus tindak pidana ulang. meskipun ada sedikit kendala, jumlah narapidana yang mengikuti program reintegrasi sosial sudah sesuai dengan harapan dan sebagian besar target peserta dapat dipenuhi.

b. Narapidana diterima dimasyarakat

Narapidana yang telah mengikuti program reintegrasi sosial akan diterima kembali oleh masyarakat setelah dibebaskan. Keberhasilan reintegrasi sosial dapat ditentukan oleh apakah mantan penggangtunya dapat bekerja, dapat berintegrasi kembali ke masyarakat, atau tetap bebas dari kegiatan kriminal.

Mantan narapidana kurang diterima dengan baik dimasyarakat karena beberapa faktor-faktor seperti rasa takut, kecurigaan, dan pengalaman buruk masih menghalangi masyarakat untuk membuka peluang kerja lebih luas bagi mereka. Keberhasilan program reintegrasi sosial melalui pembebasan bersyarat ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana mantan narapidana dapat menunjukkan perubahan positif dalam perilaku mereka, tetapi stigma sosial yang masih melekat yang ada di masyarakat tetap menjadi hambatan utama.

3. Kepuasan terhadap program

Kepuasan terhadap program mencakup persepsi narapidana terhadap proses dan hasil program reintegrasi. Kepuasan ini bisa dilihat dari bagaimana narapidana merasa program ini bermanfaat dalam membantu mereka mempersiapkan diri untuk hidup di masyarakat, Kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa program berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan para narapidana.

a. Kepuasan yang dirasakan

Tingkat kepuasan yang dirasakan atau tanggapan oleh narapidana yang mengikuti program reintegrasi sosial melalui pembebasan bersyarat dan untuk mengetahui sejauh mana mereka merasa program tersebut bermanfaat bagi mereka.

klien atau mantan narapidana sangat puas dengan adanya program tersebut karena selain membantu mendapat pengurangan tindak pidana, mereka juga diberikan kesempatan untuk memperoleh keterampilan baru, serta adanya dukungan dari petugas serta fasilitas yang diberikan. dimana hal tersebut membantu mereka untuk mempersiapkan diri kembali kemasyarakat,serta mendapat pekerjaan yang layak. Setelah keluar dari penjara. namun, beberapa narapidana juga berharap program ini dapat diperluas, agar mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

a. Kualitas yang dihasilkan.

Menilai kualitas dari hasil yang dicapai oleh program reintegrasi sosial. Kualitas ini mencakup apakah narapidana memperoleh pekerjaan yang layak, keterampilan yang berguna, apakah mereka merasa lebih siap secara mental dan emosional untuk menghadapi kehidupan setelah keluar dari penjara, serta apakah program tersebut berhasil memfasilitasi proses reintegrasi secara efektif.

disimpulkan bahwa kualitas yang dihasilkan sudah cukup baik dan positif. Program reintegrasi sosial melalui pembebasan bersyarat tersebut membantu klien atau mantan narapidana dalam mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Klien mendapatkan bimbingan keagamaan dan keterampilan yang bermanfaat, seperti mengajar mengaji dan

keterampilan teknis, yang mendukung proses pembebasan bersyarat dan pengurangan masa pidana.

A. Tingkat Input dan Output.

Hal ini berkaitan dengan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program (input) dan hasil atau dampak yang dicapai (output). Input bisa mencakup tenaga kerja, waktu, fasilitas, dan biaya yang diperlukan dalam program, sementara output meliputi jumlah narapidana yang berhasil direintegrasi dan perubahan perilaku yang signifikan pada narapidana tersebut. Tingkat input dan output juga dapat dilihat sebagai perbandingan antara sumber daya yang diinvestasikan dengan hasil yang diperoleh, sehingga menunjukkan efektivitas dan efisiensi program dalam mencapai tujuan reintegrasi sosial narapidana.\

a. Efisien

Program Reintegrasi Sosial melalui pembebasan bersyarat dapat mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia (misalnya, dana, waktu, dan tenaga) secara optimal. program yang efisien mampu memberikan hasil yang baik dengan meminimalkan pemborosan sumber daya.

program reintegrasi sosial melalui pembebasan bersyarat di balai pemasyarakatan sudah cukup efektif. akan tetapi untuk pembimbingan kepribadian dan kemandirian tidak dijalankan sepenuhnya. Jadi beberapa mantan narapidana tidak mengikuti pembimbingan karena tidak seusia passion mereka. Maka dari itu anggaran sangat diperlukan untuk perluasan pembimbingan kemandirian di tahun 2025 mendatang.

b. Efektif

Program yang efektif adalah program yang dapat memberikan hasil positif bagi masyarakat yang berpartisipasi di dalamnya. Dan seberapa efektif program ini dalam membantu Narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat.

program reintegrasi sosial melalui pembebasan bersyarat di balai pemasyarakatan sudah cukup efektif. akan tetapi untuk pembimbingan kepribadian dan kemandirian tidak dijalankan sepenuhnya. Jadi beberapa mantan narapidana tidak mengikuti pembimbingan karena tidak seusia passion mereka. Maka dari itu anggaran sangat diperlukan untuk perluasan pembimbingan kemandirian di tahun 2025 mendatang.

c. Faktor faktor yang mempengaruhi program reintegrasi sosial narapidana melalui pembebasan bersyarat di balai pemasyarakatan Kelas II amuntai

ada beberapa 2 faktor yang mempengaruhi keberhasilan program reintegrasi sosial melalui pembebasan bersyarat ini. yaitu faktor penghambat dan faktor pendorong.

1. faktor pendorong

- dukungan dari keluarga

2. faktor penghambat

- anggaran dan Fasilitas yang kurang memadai
- keterbatasan kuantitas sumber daya manusia
- ketidaksiapan sebagian narapidana untuk berinteraksi kembali kemasyarakat.

faktor yang pendorong program reintegrasi sosial adalah dukungan dari keluarga. dukungan keluarga yang tinggi tidak hanya memberikan kekuatan emosional dan mental bagi mantan narapidana, tetapi juga memainkan peran dalam membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik. Keluarga menjadi salah satu faktor utama yang dapat mempercepat proses perubahan dan reintegrasi klien ke dalam masyarakat, sehingga mereka dapat hidup lebih produktif dan bebas dari keterlibatan kembali dalam aktivitas kriminal. Sedangkan untuk faktor penghambat program reintegrasi sosial narapidana melalui pembebasan bersyarat yaitu pertama, anggaran dan Fasilitas yang kurang memadai, seperti keterbatasan sarana mobilisasi dan anggaran untuk perluasan pelaksanaan pembimbingan. Kedua, keterbatasan kuantitas sumber daya manusia, khususnya jumlah pegawai pembimbing kemasyarakatan. Sehingga pelaksanaan program tidak dapat dilakukan secara optimal. Ketiga, ketidaksiapan sebagian narapidana untuk berintegrasi kembali kemasyarakat.

SIMPULAN

1. Efektivitas Program reintegrasi sosial narapidana melalui pembebasan bersyarat dibalai pasyarakatan kelas II Amuntai Masih belum terlaksana dengan cukup baik karena masih ada beberapa kendala, Hal ini dilihat dari :
 - a. Pada Sub Variabel Keberhasilan Program secara umum berjalan dengan cukup efektif. Program reintegrasi sosial di Bapas Amuntai memberikan dampak positif dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat, berbekal keterampilan yang berguna untuk memperoleh pekerjaan. meskipun terdapat beberapa kendala yang menghambat, seperti pelanggaran hukum baru oleh beberapa mantan narapidana (residivisme), keterbatasan anggaran, serta kurangnya fasilitas dan koordinasi dengan pihak terkait.
 - b. Pada sub variabel Keberhasilan Sasaran sudah cukup efektif. Sebagian besar pembimbing menyatakan bahwa keberhasilan program reintegrasi sosial melalui pembebasan bersyarat ini mencapai sekitar 50% hingga 70%. Untuk yang mengikuti pembebasan bersyarat laki-laki berjumlah 1190. Perempuan berjumlah 65 orang. jadi ketika dilaksanakan selama pembimbingan secara umum sampai sekarang terpenuhi. akan tetapi ada beberapa mantann narapidana atau klien tidak berhasil menjalankan program reintegrasi salah satu indikasinya melakukan pelanggaran hukum baru. Akan tetapi secara umum persentasi residivisme tidak terlalu besar di balai pasyarakatan kelas II amuntai. pada indikator diterimanya narapidana di masyarakat program ini kurang efektif dalam mengatasi stigma negatif yang masih melekat pada mantan narapidana di masyarakat. Meskipun terdapat usaha untuk menerima mantan narapidana kembali ke lingkungan kerja, faktor-faktor seperti rasa takut, kecurigaan, dan pengalaman buruk masih menghalangi masyarakat untuk membuka peluang kerja lebih luas bagi mereka.
 - c. Pada sub variabel kepuasan terhadap program yang dirasakan oleh para mantan narapidana sudah cukup efektif, yaitu program ini sangat membantu mereka untuk mendapat pengurangan masa tindak pidana tentunya melalui beberapa assesmen dan perlengkapan persyaratan persyaratannya. salah satunya berkelakuan baik selama di dalam tahanan. kualitas yang dihasilkan oleh program reintegrasi sosial melalui pembebasan bersyarat ini sangat membantu narapidana untuk memperoleh keterampilan dan mempersiapkan diri dalam kehidupan pasca-pembebasan. Dampak positif dari program ini tercermin dalam meningkatnya kemandirian narapidana yang berhasil mendapatkan pekerjaan, meskipun masih ada hambatan terkait stigma masyarakat terhadap mantan narapidana.
 - d. Pada sub variabel tingkat input dan output, Program ini terbukti cukup efektif dan efisien dalam mengurangi over kapasitas di lembaga pasyarakatan dimana hal tersebut juga membuat beban keuangan negara berkurang dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat dan mendapat pekerjaan yang layak dan hidup produktif setelah keluar dari tahanan.
 - e. Faktor Faktor Yang mempengaruhi Keberhasilan Program Reintegrasi sosial Narapidana melalui pembebasan bersyarat Dibalai Pasyarakatan Kelas II Amuntai terbagi menjadi dua. Pertama, faktor pendorong meliputi: dukungan yang tinggi dari keluarga. Kedua, faktor penghambat meliputi: anggaran dan fasilitas yang memadai seperti, mobilisasi. terbatasnya kuantitas SDM sebagai Pegawai pembimbing kemasyarakatan dan ketidaksiapan sebagian narapidana untuk berintegrasi kembali kemasyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Makmur.2011.*Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung : PT Revika Aditama.
- Mutiarin,Dyah dan Arif Zainudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Prabowo,Kristian. 2021. *Peran Lembaga Per masyarakatan Dalam Proses Reintegrasi Sosial (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram*.
- Putri,Delia. 2021. *Pelaksanaan program reintegrasi sisal bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II Pekanbaru, Riau*.
- Rizal, jos. S. Sos. 2023. *Pekerja sosial dalam sistem peradilan pidana anak*, Zahir Publishing.
- Rostiana, S.H. 2021. *Fungsi litmas terhadap narapidana*, Enggang Media.
- Saefudin, Wahyu. 2020. *Psikologi pemasyarakatan*, kencana A.